

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AK, Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Amiruddin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta

Fuady, Munir 1995, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research*, ANDI, Yogyakarta.

Hartono, C.F.G Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumi, Bandung

Hiariej, Eddy O.S dan Zainal Arifin Mochtar, 2021, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Yogyakarta

HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.

Kymlicka, Will, 2022, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Lontoh, Rudy (Ed.), 2021, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

_____, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Remi Sjahdeini, Sutan, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverdonering Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta.

_____, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004*, Grafiti, Jakarta.

Russel, Bertrand, 2016, *Sejarah Filsafat Barat dan kaitannya dengan kondisi sosio politik dari zaman kuno hingga sekarang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Soeroso, R, 2010, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta

Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.

Sukismo, 2008, *Kebenaran Ilmiah dan Pokok-pokok Penelitian Hukum Normatif*, Puskumbangsi Leppa UGM, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W. 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Sebuah Panduan Dasar*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syamsudin, M. , 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Yogyakarta.

Wignjosumarto, Parwoto, 2003, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*, Tatanusa, Jakarta.

Wijayanta, Tata., 2013, *Penyelesaian Kes Kebankrapan di Mahkamah Tinggi Malaysia dan Pengadilan Niaga di Indonesia*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Jurnal

Amirul Haq, M. Bagas dan Tata Wijayanta, 2020, "Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 14, Issue 12..hlm. 715-729.

Novitasari dan Tata Wijayanta, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 1 Issue 2, hlm 192-204.

Putriyanti, Erma Defiana dan Tata Wijayanta, 2010, "Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, hlm. 482-497

Wijayanta, Tata, 2007, "Pelaksanaan Pasal 302 ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan Dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam Perkara Kepailitan", *Jurnal Legality*. Hlm. 125-139

Wijayanta, Tata, 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Purwokerto. Hlm. 216-226.

Wijayanta, Tata, 2014, "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 1-13.

Laporan Hasil Penelitian

Nadirah, Ida, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan, *Disertasi*, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Purba, Jamaslin, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kecil Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitor (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines), *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sardoni, Randi Ikhlas, 2011, Instrumen Insolvensi Tes Pada Perkara Kepailitan di Indonesia, *skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Depok Universitas Indonesia, Depok.

Thiopulus, Naskel, 2021, Analisis Perbandingan Putusan Hakim Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tentang Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Perdamaian Ditinjau Dari Pasal 281 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-Pkpu/2019/Pn.Niaga.Mdn. Dan Putusan No. 119/Pdt.SusPkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst), *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Universitas Gadjah Mada, Jakarta.

Wijayanta, Tata, 2003, Relevansi Lembaga Dissenting Opinion Dalam Penyelesaian Sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rahmah, Annisa, 2011, Analisis Komparatif Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841)

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2021)

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/PDT.Sus-Pailit/2017 perihal kasasi perkara PT. Mitra Kayu Industri melawan PT Pazia Pillar Mercycom, 22 Desember 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/Pdt.Sus/2011 perihal kasasi perkara PT Kertas Blabak Magelang melawan PT Greta Sastra Prima, 21 Oktober 2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pdt.Sus/2009 perihal kasasi perkara PT Bank Bukopin melawan PT Bina Perkasa Indograha, 24 November 2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 perihal kasasi atas putusan pengesahan perdamaian PT. Sumatera Persada Energi.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat perihal putusan homologasi PT. Mahkota Sentosa Utama, 18 Desember 2020

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Sby perihal putusan homologasi PT. Gala Bumi Perkasa, 6 Mei 2021.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. perihal putusan homologasi PT. Kertas Blabak Magelang.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga
Jkt. Pst. Perihal putusan homologasi PT. Sumatera Persada Energi

Sumber Internet

Hukumonline.com, 2017, *Gagasan Insolvency Test Tidak Relevan untuk Revisi UU Kepailitan*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/gagasan-insolvency-test-tidak-relevan-untuk-revisi-uu-kepailitan-lt59f1abb87e6fe?page=2>, diakses
pada 2 Maret 2023

Merdeka.com, Sidang kasus Pasar Turi, bos PT GBP dituntut empat tahun penjara. dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/sidang-kasus-pasur-turi-bos-pt-gbp-dituntut-empat-tahun-penjara.html>, diakses pada: 31 desember 2022

Detik.com, *Konsumen Meikarta Ngaku Nggak Dilibatkan Bahas Perdamaian Soal Serah Terima di 2027*, <https://finance.detik.com/properti/d-6459138/konsumen-meikarta-ngaku-nggak-dilibatkan-bahas-perdamaian-soal-serah-terima-di-2027>, diakses pada : 12 Februari 2023